



TAHUN  
2023

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pengadilan Militer II – 11  
Yogyakarta

Jl. Perempatan Ringroad Timur, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta

Yogyakarta, Januari 2024

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang maha Esa atas petunjuk dan bimbingan-Nya sehingga tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta merupakan bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang dibebankan kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memuat data dan informasi pelaksanaan tugas serta capaian kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta di tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari SAKIP Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2023. SAKIP yang handal, efektif dan efisien akan mendorong terwujudnya reformasi birokrasi menuju *good governance*.

Penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selain ditujukan untuk efisiensi dan efektifitas kerja mengingat luasnya wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Beberapa bentuk optimalisasi teknologi informasi yang telah dilakukan diantaranya yaitu melaksanakan sidang secara online, memberikan pelayanan secara online dan pembuatan aplikasi guna peningkatan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberi manfaat dan mendorong Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk menjadi lebih baik di masa mendatang.

Yogyakarta, Januari 2024

Kepala Pengadilan Militer II-11,



Rony Suryandoko  
Kolonel Cnk

## DAFTAR ISI

PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I           PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Profil Organisasi.....	2
C. Aspek Strategis.....	9
D. Isu Strategis.....	14
E. Kondisi Lingkungan Strategis.....	15
F. Sistematika Penyajian.....	18
<b>BAB II           PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>20</b>
A. Indikator Kinerja Utama.....	21
B. Rencana Strategis .....	23
C. Arah Kebijakan Strategis.....	28
D. Rencana Kinerja Tahunan.....	29
E. Perjanjian Kinerja.....	30
<b>BAB III          AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>33</b>
A. Capaian Kinerja Tahun 2023.....	33
B. Realisasi Anggaran.....	54
<b>BAB IV          PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>iii</b>

# LAMPIRAN

<b>DAFTAR ISI</b>		
PENGANTAR .....	i	
DAFTAR ISI .....	ii	
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang .....	1
	B. Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
	C. Struktur Organisasi dan Wilayah Hukum .....	7
	D. Kondisi Lingkungan Strategis .....	9
	E. Sistematika Penyajian .....	13
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>15</b>
	A. Rencana Strategis... ..	15
	B. Rencana Kinerja Tahunan .....	21
	C. Perjanjian Kinerja.....	23
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINNERJA .....</b>	<b>26</b>
	A. Capaian Kinerja 2020.....	26
	B. Realisasi Anggaran.....	54
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
	A. Kesimpulan .....	65
	B. Saran .....	66
LAMPIRAN .....	iv	

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. LATAR BELAKANG.**

Reformasi pelayanan publik telah menjadi agenda awal dari reformasi birokrasi yang di canangkan oleh pemerintah. Pelayanan publik menjadi Core Business birokrasi pemerintahan. Pelayanan publik yang efektif dan efisien, responsif, partisipatif dan akuntabel akan mendorong meningkatnya kinerja birokrasi dalam mewujudkan *Good Governance*.

Reformasi birokrasi harus disertai dengan rencana aksi yang jelas serta diimplementasikan secara konkrit dan konsekuen. Reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara komprehensif dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

Sebagai komitmen untuk mendukung reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melakukan perubahan-perubahan dengan terus berinovasi dalam pelaksanaan tugas pokok. Inovasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mendukung peningkatan kinerja, proses penyelesaian perkara dan penguatan kinerja di masing-masing bidang.

Kemandirian kekuasaan kehakiman, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara teknis yudisialnya akan berjalan lebih lancar apabila didukung secara teknis administratif peradilan (dalam hal ini pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan militer). Dukungan teknis administratif terhadap teknis yudisial peradilan militer, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengemban tugas menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai bagian dari peradilan militer, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta secara hierarki organisatoris dan administratif berada di bawah Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selaku kawal depan (*voor-post*) Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya senantiasa

berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Salah satu pilar dalam mewujudkan *good governance* adalah akuntabilitas instansi pemerintah yang dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2023 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2023, dalam rangka mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada masa yang akan datang.

## **B. PROFIL ORGANISASI**

### **1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **A) Kedudukan**

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung RI, maka seluruh Peradilan Militer di Indonesia, termasuk Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, beralih berada satu atap di bawah pembinaan Mahkamah Agung RI.

Gedung Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang merupakan tempat pelayanan peradilan dan proses persidangan berlokasi di Jl. Perempatan Ringroad Timur, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018 tentang Kelas, Tipe dan

Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, Daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta meliputi wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sebagian kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu : Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Purworejo.

Peta Dislokasi Wilayah Hukum Dilmil II-11 Yogyakarta



Mengingat luasnya lingkup tugas dan kompleksnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta maka penyelenggaraan manajemen peradilan yang baik merupakan hal yang penting. Hal ini bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, namun secara signifikan juga mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri.

## B) Tugas Pokok

Tugas pokok Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan sebagai berikut “Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwaanya adalah”:

- 1) Prajurit berpangkat Kapten ke bawah ;

- 2) Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwanya “termasuk tingkat kepangkatan” Kapten ke bawah; dan
- 3) Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer;
- 4) Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Dimana pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

- 1) Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- 2) Terdakwanya termasuk dalam Kesatuan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

### **C) Fungsi.**

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta di bidang fungsi teknis yustisial bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi ideal yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Tahun 2010-2035.

Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, fungsi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan teknis yustisial.
- b) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara, administrasi peradilan dan administrasi umum.
- c) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Pidana dan Peradilan Militer pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

d) Melakukan pengawasan internal terhadap jalannya peradilan militer tingkat pertama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan independen, efektif, dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi ideal yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Tahun 2010-2035.

Selain Fungsi diatas, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta juga memiliki fungsi lain sebagai pendukung yaitu:

1) Fungsi Administrasi

Yaitu menyelenggarakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok peradilan.

Dalam melaksanakan fungsi administrasi, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan baik dari Mahkamah Agung maupun dari instansi pemerintah lain yang terkait, misalnya Kementerian Keuangan atau BKN.

2) Fungsi Pembinaan

Yaitu untuk mendukung dalam hal peningkatan kinerja dan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan fungsinya dalam hal pembinaan, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melalui Kepala Pengadilan Militer selaku pimpinan melaksanakan pembinaan di internal Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melalui rapat koordinasi atau jam komandan secara rutin minimal sebulan sekali untuk menyampaikan arahan, informasi atau melakukan evaluasi secara umum.

Adapun pembinaan di luar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dilakukan saat majelis hakim melakukan sidang keliling atau saat tim dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melakukan pengawasan dan pengamatan di Pemasarakatan Militer. Pembinaan ini umumnya berupa penyuluhan hukum.

### 3) Fungsi Pengawasan

Yaitu merupakan pendukung terlaksananya sistem penyelenggaraan organisasi yang transparan dan akuntabel. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Kepala Pengadilan Militer membentuk Hakim Pengawas Bidang yang bertugas melakukan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini dilakukan secara rutin sekali dalam tiga bulan, dan selanjutnya catatan hasil evaluasi ini dilaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer untuk ditindaklanjuti.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, susunan organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah aparatur negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Kesekretariatan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah aparatur negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kesekretariatan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Dalam hal penyelenggaraan keseluruhan fungsi dalam pengadilan baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat asas dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta membarenginya dengan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat yang dilakukan secara berjenjang

sesuai dengan struktur organisasi pengadilan maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, secara umum pelaksanaan manajemen peradilan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta bertujuan untuk mewujudkan :

1. Tata kelola pengadilan yang baik, efektif, dan efisien.
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas aparatur pengadilan.
4. Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya peradilan.

## **2. STRUKTUR ORGANISASI**

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik yang terkait dengan bidang teknis dan administrasi yustisial maupun dalam bidang dukungan teknis dan administratif, Mahkamah Agung telah membuat kerangka kelembagaan dan organisasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, yang dijadikan sebagai acuan kerangka kinerja aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan untuk Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai berikut:

Kepaniteraan dipimpin oleh Panitera, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Pidana; dan
- b. Panitera Muda Hukum;

Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris, terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Keuangan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan.

Di samping Organisasi struktural, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memiliki organisasi fungsional yaitu Kelompok Hakim Militer (Pokkimil) dan

Panitera Pengganti, serta jabatan fungsional di bagian kesekretariatan yaitu arsiparis, pustakawan, pranata komputer, dan bendahara.

1) Kelompok Hakim Militer

Kelompok Hakim Militer dalam susunan fungsional organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memiliki tugas dan kewajiban, memeriksa dan memutus setiap perkara pidana dan Pelanggaran yang ditanganinya.

Berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku, susunan Majelis Hakim ditentukan oleh Kadilmil dan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman menganut asas peradilan yang bebas. Pertanggungjawaban pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Hakim Militer (Pokkimmil) adalah para Hakim Militer di Pengadilan Militer yang memiliki tugas dan kewajiban, selain menjadi Hakim juga memberikan saran dan pertimbangan tentang penyelenggaraan fungsi teknis Hakim Militer.

2) Panitera Pengganti

Panitera pengganti merupakan petugas sidang yang bertugas menyelenggarakan administrasi persidangan dan membantu hakim dalam persidangan untuk membuat berita acara pemeriksaan sidang.

3) Fungsional Kesekretariatan

Jabatan fungsional pada bagian kesekretariatan antara lain pustakawan, arsiparis, dan pranata komputer. Bahwa sampai saat ini jabatan tersebut belum terisi.

Struktur Organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta



Dari struktur organisasi tersebut dapat dipetakan tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian sehingga pelaksanaan beban kerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah terbagi habis ke seluruh sumber daya manusia di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

### **C. ASPEK STRATEGIS**

Aspek strategis merupakan aspek yang berpengaruh terhadap nilai-nilai terbentuknya visi, misi dan tujuan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Aspek strategis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terdiri dari aspek manajemen sumber daya manusia, aspek manajemen peradilan dan aspek pengelolaan anggaran.

#### **a. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA**

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset organisasi yang sangat penting, karena peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Betapapun modern teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang baik semuanya menjadi tidak bermakna.

Sebagai pemegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, pembinaan dan pengelolaan SDM mendapat perhatian besar dalam hal peningkatan kualitas, yang meliputi perubahan pola pikir dan peningkatan kinerja menjadi lebih baik.

Sumber daya manusia Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terdiri dari 3 jenis status kepegawaian yaitu personel Militer (Prajurit TNI), PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri). Tahun 2023 Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berjumlah 46 orang dengan rincian 23 orang Militer, 13 orang PNS, dan 8 orang PTT.

Data Pegawai

No	Nama	Jabatan	Keterangan		
1	Tehnis Pengadilan	Kepala	1 Orang		
		Wakil Kepala	1 Orang		
		Pokkimmil	4 Orang		
		Panitera	1 Orang		
		Panmud Pidana	Kosong		
		Panmud Hukum	Kosong		
		Panitera Pengganti	4 Orang		
		Analisis Hukum	1 Orang		
		Pengelola Perkara Panmud Pidana	1 Orang		
		Pengelola Perkara Panmud Hukum	2 Orang		
		Pengolah Data Keberatan dan Banding	1 Orang		
		Analisis Perkara Peradilan	1 Orang		
		2	Non Tehnis Pengadilan	Sekretaris	1 Orang
				Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1 Orang
Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang				
Kasubbag Umum dan Keuangan	1 Orang				
Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	1 Orang				
Analisis Humas	1 Orang				
Pengelola Sistem dan Jaringan	1 Orang				
Verifikator Keuangan	1 Orang				
Pranata Barang dan Jasa	1 Orang				
Pengelola Data PTIP	1 Orang				
Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian	1 Orang				
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1 Orang				
Pengadministrasi Persuratan	1 Orang				
Pengelola Kepegawaian	1 Orang				
3	Jabatan Fungsional	Arsiparis	Kosong		
		Pustakawan	Kosong		
		Pranata komputer	Kosong		
		Bendahara	1 Orang		
		Pranata Peradilan	Kosong		

Adapun sebaran sumber daya manusia di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berdasarkan jenis kelamin, status kepegawaian, pendidikan dan usia adalah sebagai berikut :

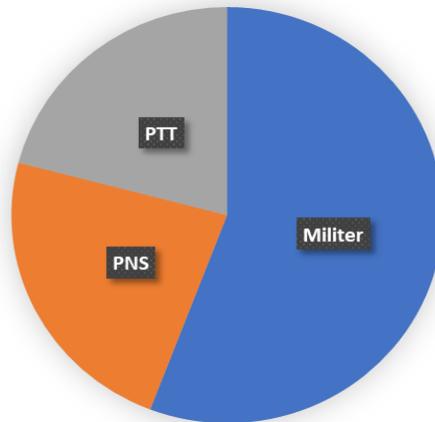
**1) Sebaran Pegawai berdasarkan status kepegawaian**

Ditinjau dari status kepegawaian, pegawai Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terdiri dari personel Militer, PNS dan PPNPN. Tenaga PPNPN merupakan tenaga kontrak dengan jangka waktu kontrak selama 1 (satu) tahun anggaran. Bila memiliki kinerja baik dan memenuhi syarat akan dikontrak lagi untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

Tabel : Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase (%)
1	Militer	23	50,00
2	PNS	13	28,26
3	PPNPN	8	21,74
Jumlah Total		46	100,00

Grafik : Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



**2) Sebaran Pegawai berdasarkan jenis kelamin**

Sebaran pegawai Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel : Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Militer	18	5
2	PNS/CPNS	9	4
3	PTT	8	0
Jumlah Total		46	6

**3) Sebaran Pegawai berdasarkan Pangkat**

Sebaran pegawai Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berdasarkan kepangkatan adalah sebagai berikut :

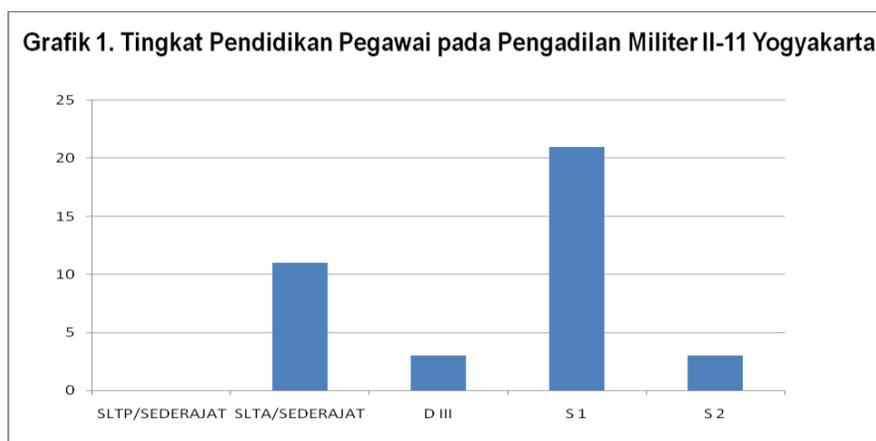
Grafik : Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan



**4) Sebaran Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

Jenjang pendidikan seluruh pegawai Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan



### 5) Sebaran Pegawai Berdasarkan Usia

Usia dan masa kerja merupakan faktor penting dalam mendongkrak kinerja. Pegawai yang memiliki masa kerja panjang lebih banyak memiliki pengalaman. Pegawai ini umumnya berusia lebih matang.

Secara umum, pengelompokan usia pegawai Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yaitu :

Tabel : Data Pegawai Berdasarkan Usia

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PTT	
1	20 – 30 Tahun	-	4	3	7
2	31 – 40 Tahun	5	2	4	11
3	41 – 50 Tahun	17	3	1	21
4	51 – 58 Tahun	3	4	-	7

Dari rentang usia tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berada di usia produktif, sehingga hal ini merupakan aset yang berharga sebagai penunjang pencapaian kinerja dengan mendasarkan pada keilmuan dan pengalaman SDM.

#### b. ASPEK MANAJEMEN PERADILAN

Aspek manajemen peradilan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Aspek manajemen peradilan diperlukan karena akan memberi pengaruh terhadap 3 (tiga) hal yaitu :

- Tercapainya tujuan peradilan
- Menjaga kesesuaian dengan tujuan di unit lain

- Efektifitas

Manajemen peradilan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dijalankan dalam rangka mendukung tugas pokok pengadilan yaitu penyelesaian perkara.

Manajemen peradilan tahun 2023 dijalankan dengan berpedoman pada rencana strategis (renstra) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2020-2024. Renstra ini selanjutnya dijabarkan dalam suatu program kerja yang merupakan perencanaan kegiatan selama tahun 2023.

Adapun pelaksanaan kegiatan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta diuraikan dalam wujud prosedur pelaksanaan kerja yang solid berupa SOP (Standar Prosedur Operasional). SOP menjadi pedoman dasar bagi pelaksanaan tugas masing-masing bagian di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Untuk memastikan pelaksanaan kinerja terlaksana dengan baik, hakim pengawas bidang melakukan monitoring dan evaluasi setiap tiga bulan sekali. Hasil pengawasan dilaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Dalam laporan ini disertakan pula rekomendasi dan saran tindak lanjut.

Selain pengawasan rutin dari hakim pengawas bidang, penilaian pelaksanaan kinerja juga diperoleh dari hasil survei kepuasan pengguna layanan peradilan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

**c. ASPEK PENGELOLAAN ANGGARAN**

Pengelolaan anggaran di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan anggaran ditujukan sebesar-besarnya untuk mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tahun 2023, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta didukung oleh anggaran yang

berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memiliki 2 (dua) DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) dan DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

#### **D. ISU STRATEGIS**

Isu strategis memberi pengaruh terhadap perencanaan kinerja, baik dalam jangka waktu pendek 1 (satu) tahun maupun jangka menengah 5 (lima) tahun. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kinerja.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah menetapkan satu isu strategis, yaitu proses penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, biaya ringan, transparan dan akuntabel. Isu strategis ini ditetapkan dengan beberapa pertimbangan, yaitu :

- Wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang sangat luas.
- Setiap pencari keadilan berhak mendapatkan keadilan.
- Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dikarenakan adanya beberapa kasus jual beli perkara yang menyangkut oknum penegak hukum.

Dengan menetapkan isu strategis, dapat dilakukan identifikasi terhadap faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelesaian perkara tersebut. Faktor pendukung terhadap isu strategis ini yaitu :

- SDM Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang secara jumlah terbatas, namun memiliki kualitas yang baik dan telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Dukungan teknologi informasi yang memadai.
- Dukungan gedung serta sarana dan prasarana yang baik.
- Dukungan anggaran yang mencukupi.

Adapun faktor penghambat terhadap isu strategis yaitu :

- Wilayah hukum Pengadilan Militer yang sangat luas, sehingga ada beberapa Terdakwa, Saksi atau pengunjung yang terkendala untuk hadir dalam persidangan.
- Tidak semua pencari keadilan paham teknologi informasi, sehingga tidak semua mampu mengakses informasi perkara secara online.

Melalui identifikasi yang tepat terhadap isu strategis, diharapkan akseptabilitas para pencari keadilan terhadap Putusan pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dapat meningkat.

Terhadap isu strategis yang telah ditetapkan, beberapa hal yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Menyelenggarakan persidangan secara tepat jadwal.
2. Menyelenggarakan persidangan secara online.
3. Menginformasikan data perkara melalui website resmi serta aplikasi SIPP (Sistem informasi Penelusuran Perkara) yang dapat diakses secara online oleh masyarakat.
4. Menyediakan saluran pengaduan masyarakat baik secara langsung dengan datang ke kantor Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta maupun secara tidak langsung dengan melalui aplikasi Siwas, telepon atau email.
5. Menyelenggarakan sidang keliling ke daerah-daerah untuk mempermudah Terdakwa dan Saksi menjalani proses persidangan.

#### **E. Kondisi Lingkungan Strategis.**

Kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada TA 2023 adalah sebagai berikut:

##### **1. Kekuatan (*Strength*).**

Kekuatan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, seperti:

- a. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta merupakan kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- b. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta merupakan unsur penegak hukum yang memiliki hubungan dengan instansi penegak hukum terkait lainnya.
- c. Mengajukan saran dan pertimbangan dalam rangka mengambil keputusan pimpinan atas terkait dengan permasalahan promosi dan mutasi bagi personel Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sendiri;
- d. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selaku Pengadilan Tingkat Pertama melakukan pengawasan internal penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Militer

## **2. Kelemahan (*Weakness*).**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dirinci dalam beberapa aspek:

- a. Aspek Proses Peradilan.
  - 1) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta belum dapat diunduh atau diakses cepat oleh masyarakat, sebelum putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
  - 2) Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
  - 1) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan.
  - 2) Rekrutmen Personil TNI dan PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang diharapkan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
  - 1) Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
  - 2) Belum maksimalnya penggunaan sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi yang tersedia.
- d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.

Belum berfungsinya secara maksimal penggunaan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.

e. Aspek Sarana dan Prasarana.

Anggaran yang diterima Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dari pusat belum sesuai dengan rencana kebutuhan yang diajukan.

### 3. Peluang (*Opportunities*).

Peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

a. Aspek Proses Peradilan.

Adanya *website* Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses perkara.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

1) Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.

2) Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala secara internal terhadap kinerja Pengadilan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan penunjukan Hakim Pengawas.

d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.

Melalui koordinasi antar Pengadilan Militer di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

e. Aspek Sarana dan Prasarana.

Tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berupa internet, *website* dan aplikasi-aplikasi lainnya.

### 4. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Tantangan-tantangan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang akan dihadapi dan upaya untuk tetap dapat melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik sebagaimana yang diharapkan, sebagai berikut:

- a. Aspek Proses Peradilan.
  - 1) Belum tersedianya suatu alat pengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan.
  - 2) Terbatasnya kemampuan para pencari keadilan untuk mengakses segala informasi peradilan melalui fasilitas teknologi informasi.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

Pembinaan karier belum maksimal karena masih ada keterbatasan baik jabatan struktural dan fungsional khususnya untuk ASN
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

Belum adanya sistem *reward* dan *punishment* untuk mengontrol kinerja aparat Peradilan Militer.
- d. Aspek Sarana dan Prasarana.

Anggaran yang diberikan Mahkamah Agung untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan rencana kebutuhan.

#### **F. Sistematika Penyajian.**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan II-11 Yogyakarta Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan tentang LKjIP, yang meliputi: Latar Belakang, Tugas pokok dan Fungsi, Visi dan misi, Struktur Organisasi pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Kondisi lingkungan strategis, dan Sistematika Penyajian.

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menguraikan ringkasan perencanaan dan perjanjian kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2023.

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Menguraikan tentang Perbandingan Pengukuran Kinerja dari TA 2021 sampai dengan TA 2023 dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023.

#### **BAB IV PENUTUP**

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

#### **BAB V LAMPIRAN**

Lampiran, yang terdiri dari :

1. Rencana Kinerja Tahun 2023;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023;
3. Matriks Kinerja dan Pendanaan 2020- 2024;
4. Surat Perintah Penyusunan SAKIP TA 2023

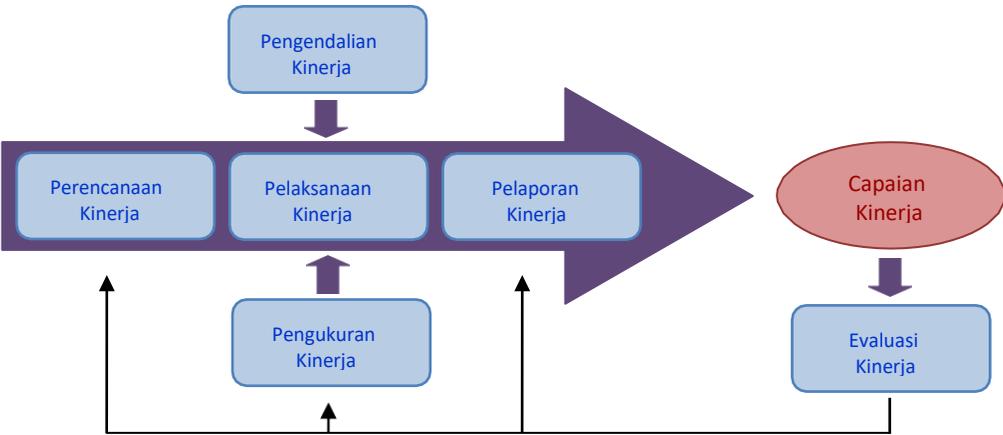
## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Manajemen kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ditujukan dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan penajaman hasil-hasil kerja. Manajemen kinerja terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pengendalian dan pelaporan kinerja. Manajemen kinerja perlu untuk selalu dikaji ulang dan disempurnakan agar dapat terwujud manajemen kinerja yang berorientasi hasil/kinerja (*output/outcome oriented*).

Melalui manajemen kinerja, pengelolaan anggaran ditujukan sebagai pendukung terlaksananya program kerja yang direncanakan, sehingga hasil dari pengelolaan anggaran adalah anggaran yang berbasis kinerja.

Manajemen Kinerja Berorientasi Hasil (*Outcome*)



Sebagai pendukung perencanaan dan pengukuran kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, hal-hal yang berkaitan dengan hasil kerja seperti indikator

kinerja utama (IKU), rencana strategis (Renstra), tujuan, sasaran, target dan capaian menjadi titik-tolak manajemen. Hal-hal tersebut penting untuk disesuaikan secara berkala melalui reuiu.

Bentuk komitmen dalam pelaksanaan kinerja, ditetapkan suatu perjanjian kinerja yang mengikat Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kinerja di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Faktor penting lain yaitu adanya pengendalian kinerja yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi berdasarkan hasil pengawasan, baik pengawasan internal maupun eksternal.

#### **A. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai tugas, fungsi serta *core bussiness* yang diemban.

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Indikator Kinerja Utama.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menggunakan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyampaian dokumen SAKIP.

Berdasar surat tersebut, dokumen SAKIP pengadilan di jajaran Mahkamah Agung diarahkan untuk menggunakan aplikasi e-SAKIP yang dapat diakses melalui aplikasi Komdanas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah menetapkan Indikator Kinerja Utama pada tanggal 06 Desember 2023 yang dipimpin oleh Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan dihadiri oleh seluruh hakim dan pegawai.

Indikator Kinerja Utama ini selanjutnya menjadi dasar dalam mereviu Renstra, dimana Renstra merupakan dasar penyusunan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terdiri dari 3 kinerja utama yaitu :

**1. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL**

Terdapat 6 (enam) indikator kinerja untuk mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama, yaitu :

- a) Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan;
- b) Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan;
- c) Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu;
- d) Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu;
- e) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- f) Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan;

**2. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA**

Terdapat 1 indikator kinerja untuk mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama, yaitu Persentase salinan putusan yang telah dikirim ke para pihak tepat waktu.

**3. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN**

Terdapat satu indikator kinerja untuk mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama, yaitu persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

## B. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Renstra merupakan langkah awal mewujudkan manajemen peradilan berbasis kinerja. Secara umum Renstra diartikan sebagai suatu pedoman untuk proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Renstra Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta periode lima tahun ketiga (2020-2024) merupakan gambaran kinerja dan rencana kinerja lembaga Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang telah disesuaikan dengan cetak biru Perubahan Peradilan 2010-2035 yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Renstra Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2020-2024 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin terjadi. Dalam Renstra terdapat tujuan dan sasaran agar dapat ditetapkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi serta memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah tercapai.

### 1. Visi misi

Di dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak terlepas dari visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, sebagai puncak pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Visi yang dimaksud adalah **Terwujudnya Pengadilan Militer II-11 yang Agung** (*Court of Excellence*). Oleh karena itu di dalam upaya mencapai visinya tersebut melalui misi yang telah ditetapkan yang meliputi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan peradilan, profesionalisme, tenaga teknis dan non teknis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta; dan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Sebagai pemacu semangat, motivasi dan sekaligus prinsip dalam bekerja, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memiliki motto I.S.T.I.M.E.W.A., yang bila diuraikan adalah merupakan singkatan dari :

I : Integritas

Yaitu selalu bersikap secara transparan, bertanggung jawab dan bersikap positif

S : Solid

Yaitu bersikap saling menghargai antar sesama pegawai

T : Tangguh

Yaitu bersikap pantang menyerah dan memiliki semangat yang tinggi

I : Imparsial

Yaitu bersikap adil dalam memberikan pelayanan

M : Militan

Yaitu memiliki semangat yang tinggi, disiplin dan bertanggung jawab

E : Empati

Yaitu memberi respon yang tepat serta menjalin hubungan baik dengan orang sekitar

W : Wibawa

Yaitu mampu menjaga kehormatan, dan menjadi teladan dalam bersikap dan perbuatan

A : Amanah

Yaitu bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya serta tidak menyalahgunakan kewenangan.

## **2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan 4 tujuan strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang diselesaikan
  - b. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang diselesaikan.
  - c. Persentase Perkara Pidana Militer yang diselesaikan Tepat Waktu.
  - d. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang diselesaikan Tepat Waktu.
2. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
- b. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan

3. Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Dengan indikator kinerja :

Persentase Salinan Putusan yang telah dikirim ke para pihak tepat waktu.

4. Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Dengan indikator kinerja :

Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan.

Untuk menetapkan hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu yang lebih pendek daripada tujuan (tahunan) maka Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan sasaran-sasaran dalam rencana strategisnya.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur dengan jangka waktu lebih pendek dari tujuan.

Sasaran strategis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta setelah disinkronkan dengan indikator kinerja utama yang telah direviu adalah:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan
- b. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan.
- c. Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu.
- d. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu.
- e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
- f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. Dengan indikator kinerja :

Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim kepada para pihak tepat waktu

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Dengan indikator kinerja :

Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan.

Ketiga sasaran tersebut belum dapat menjelaskan sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya secara spesifik dan terukur, karenanya Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan program utama dan kegiatan pokok yang akan dicapai dalam tahun 2023 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

### 3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan berdasarkan Renstra yang telah disusun, perlu diperjelas dengan penetapan program utama dan kegiatan pokok yang lebih terperinci.

Program utama merupakan kebijakan dan penjabaran langkah-langkah yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran setiap tahunnya.

Kegiatan pokok merupakan kegiatan terperinci dengan dukungan anggaran yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Tahun 2023 terdapat 3 program utama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, yaitu :

- a) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer
- b) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
- c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

#### a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Program ini merupakan program untuk mempercepat proses penyelesaian perkara.

Dalam program ini terdapat satu kegiatan yaitu peningkatan manajemen peradilan militer. Program ini disusun untuk mendukung 4 tujuan dalam Renstra, yaitu :

- 1) Terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- 2) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan.
- 3) Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif, efisien dan akuntabel.
- 4) Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

**b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program ini merupakan pendukung kelancaran kegiatan administrasi umum serta pelaksanaan kegiatan teknis.

Melalui program ini Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berupaya untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran serta untuk memenuhi hak-hak para pegawai. Dalam program ini terdapat 1 kegiatan yaitu Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.**

Program ini merupakan pendukung kelancaran kegiatan administrasi umum dan administrasi lainnya serta pelaksanaan kegiatan teknis lain.

Melalui program ini Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berupaya untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran. Dalam program ini terdapat 1 kegiatan yaitu Pengadaan Sarana Dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung.

**C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS**

Dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung, serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, maka Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan 3 sasaran strategis yaitu :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Terwujudnya proses Peradilan

Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel”, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Adanya regulasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara dan proses peradilan.
- b) Penguatan pengawasan eksternal dan internal.
- c) Pelaksanaan Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai.
- b) Penerapan regulasi yang tepat tentang penyelesaian perkara.

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan”, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Adanya mekanisme penanganan pengaduan.
- b) Penambahan volume pelaksanaan sidang keliling.
- c) Peningkatan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

#### **D. RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Dalam penetapan target kinerjanya, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan turunan atau pelaksanaan tahunan dari Renstra.

RKT bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terarah dan fokus terhadap pencapaian Renstra. RKT ini juga selanjutnya akan digunakan untuk menyusun RKA (Rencana Kerja Anggaran), TOR (Term Of Reference) dan RAB (Rincian Anggaran Biaya). RKT Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2023 yaitu sebagaimana berikut :

Tabel Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan	100%		
		Persentase sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan	100%		
		Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu	100%		
		Persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu	100%		
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95%		
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90%		
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	90%		
		Persentase salinan putusan perkara pidana militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100%		
		2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
				3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

## E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sebagai pemberi amanah kepada Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dalam perjanjian kinerja dilampirkan pula penetapan kinerja dimana di dalamnya terdapat Indikator Kinerja dan target kinerja. Target kinerja tersebut selaras dengan arah dan tujuan Pengadilan Militer II-11

Yogyakarta. Target kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2023 mengacu kepada target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

## **1. TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2023 disusun di awal tahun 2023 yaitu setelah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menerima DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) TA 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014, tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja yaitu :

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
- 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi.
- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
- 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

## **2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Adanya rewiu IKU dan rewiu Renstra mengharuskan perjanjian Kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2023 juga disesuaikan. Hasil rewiu menyatakan bahwa IKU dan Renstra masih sesuai dan belum diperlukan adanya perubahan, sehingga perjanjian kinerja pun dinilai masih berlaku.

Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada bulan Januari 2023.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2023 yaitu sebagaimana berikut :

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan	100%
		Persentase sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu	90%
		Persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu	90%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	100%
		Persentase salinan putusan perkara pidana militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	90%

Untuk mendukung terselenggaranya program utama dan kegiatan pokok demi tercapainya target kinerja, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mengalokasikan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaporan kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhimpun dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Penyusunan SAKIP Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dikerjakan oleh tim yang ditunjuk sesuai Keputusan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor W2-Mil.04/56/KEP/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Penunjukan Tim Penyusunan LKjIP Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Tim bekerja menyusun SAKIP dengan mengumpulkan, menelaah dan mengolah data-data yang diperoleh dari seluruh bagian di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

#### **A. Capaian Kinerja Tahun 2023.**

##### **1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023.**

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan untuk mengukur capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan penghargaan atau sanksi, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi indikator kinerja yang telah dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Nilai capaian kinerja menjadi indikator besarnya kinerja.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dinilai memiliki kinerja baik jika nilai realisasi sama dengan atau lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ditahun 2023 adalah sebagaimana berikut :

**Tabel : Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase sisa perkara Pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu	100,00 %	100,00 %	100,00%
		Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	90,00%	49,25%	54,72%
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang puas terhadap Layanan Peradilan	90,00%	94,83%	100,00%

2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
3.	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)	90,00%	200,00%	100,00%

## 2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2023 yang akan dianalisis didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Capaian kinerja tersebut dianalisis berdasarkan masing-masing sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ditetapkan.

### A) SASARAN STRATEGIS 1

#### *Terwujudnya Proses Peradilan Yang pasti, Transparan Dan Akuntabel*

Sasaran Strategis *Terwujudnya Proses Peradilan Yang pasti, Transparan Dan Akuntabel* menggambarkan keterbukaan, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, sisa perkara maupun ketepatan waktu dalam menyelesaikan perkara. Sasaran strategis 1 memiliki 6 indikator kinerja yaitu :

- a) Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan;
- b) Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan;
- c) Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu;
- d) Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu;
- e) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya

Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;

f) Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas dengan layanan Peradilan.

Yang dimaksud dengan perkara pidana militer dalam indikator kinerja ini adalah perkara pidana kejahatan yang dilakukan oleh personel militer.

Perkara pidana kejahatan terdiri dari perkara pidana umum dan perkara pidana militer.

**Perkara pidana militer** yang akan dihitung dan dianalisa dalam laporan ini adalah **jumlah dari perkara pidana umum dan pidana militer**.

Hasil perhitungan capaian dari sasaran strategis 1 yaitu sebagaimana ditunjukkan tabel berikut :

Tabel Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase sisa perkara Pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu	100,00 %	100,00 %	100,00%
		Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	90,00%	49,25%	54,72%
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang puas terhadap Layanan Peradilan	90,00%	94,83%	100,00%

Sebelum masuk dalam perhitungan dan analisis capaian untuk masing-masing indikator kinerja sasaran, berikut akan diuraikan dan disajikan data penyelesaian perkara sebagai bahan pendukung dalam perhitungan dan pembahasan capaian kinerja. Tahun 2023 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak memiliki perkara sisa dari tahun 2022, selanjutnya menerima perkara masuk sejumlah 67 perkara yang terdiri dari 66 perkara kejahatan dan 1 perkara pelanggaran. Jumlah beban perkara ditahun 2023 sebesar 67 perkara.

Dari beban perkara di atas, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah memutus sejumlah 67 perkara.

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus	Dikembalikan	Ket
a	b	c	d	e	f	g
<b>Sisa awal Perkara tahun 2023 : 0</b>						
1	Pelanggaran lalu lintas	0	1	1	0	
2	Desersi	0	20	20	0	
3	Insubordinasi	0	1	1	0	
4	Jaminan Fidusia	0	2	2	0	
5	KDRT	0	2	2	0	
6	Kecelakaan Lalu lintas	0	1	1	0	
7	Nikah siri	0	1	1	0	
8	THTI	0	2	2	0	
9	Pelanggaran Asusila	0	7	7	0	
10	Penganiayaan	0	5	5	0	
11	Penggelapan	0	3	3	0	
12	Penipuan	0	18	18	0	
13	Perzinahan	0	2	2	0	
14	Narkotika	0	2	2	0	
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	

Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana ditunjukkan tabel diatas selanjutnya dilakukan analisa capaian berdasarkan

masing- masing indikator kinerja. Berikut adalah perhitungan dan analisa indikator kinerja yang berjumlah 8 indikator kinerja.

### **1) Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan**

Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara pidana militer yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana militer yang harus diselesaikan.

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara pidana militer (pidana kejahatan) di tahun 2023.

Sisa perkara sendiri adalah jumlah beban perkara tahun sebelumnya yang belum diputus. Bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta di tahun 2022 dapat menyelesaikan semua perkara yang masuk, sehingga tidak terdapat sisa perkara di tahun 2023.

Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam hal penyelesaian perkara tahun 2023 terlaksana dengan baik dan telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan yaitu 100%.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menargetkan penyelesaian sisa perkara 100% karena merujuk terhadap aturan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 lingkungan Peradilan, yaitu perkara harus diselesaikan maksimal dalam jangka waktu 5 (lima) bulan, sehingga sisa perkara di tahun lalu harus selesai di tahun berikutnya.

Berdasarkan monitoring dan evaluasi dapat diketahui yang menjadi faktor keberhasilan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam penyelesaian perkara yang masuk di tahun 2023 yaitu :

- Melakukan koordinasi yang baik dengan Oditurat Militer II-10 Yogyakarta agar dapat menghadirkan Terdakwa atau Saksi sesuai dengan jadwal sidang yang telah direncanakan.
- Segera membuat rencana sidang setelah perkara masuk yang telah dinyatakan lengkap.
- Melakukan koordinasi dengan satuan terkait, agar mempercepat pengiriman surat-surat panggilan.

Dengan terpenuhinya target kinerja penyelesaian sisa perkara pidana militer, maka perjanjian kinerja tahun 2023 telah terpenuhi.

Prosedur dan kebijakan dalam penyelesaian sisa perkara pidana militer tahun 2023 yang membuahkan hasil yang memuaskan dan sesuai target, akan diterapkan di tahun 2023 sehingga diharapkan sisa perkara tahun 2023 akan dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2023.

Tabel : Capaian Indikator Kinerja Sisa Perkara Pidana Militer (Pidana Kejahatan) Yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Persentase Sisa Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan			
	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023				
- Pidana Militer		100%	100%	100%
2022				
- Pidana Militer		100%	100%	100%
2021				
- Pidana Militer		100%	100%	100%



Grafik III.1 Perbandingan Persentase Capaian Sisa Perkara Pidana Militer (Pidana Kejahatan) Yang Diselesaikan

Penyelesaian sisa perkara pidana militer di tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021 untuk perkara pidana umum dan pidana militer (pidana kejahatan) adalah sebagaimana ditunjukkan tabel diatas.

Dari tabel diatas terlihat bahwa kinerja penyelesaian sisa perkara pidana militer (pidana kejahatan) di tahun 2023 dibanding di tahun 2022 dan tahun 2021 adalah sama, yaitu 100%.

Penyelesaian sisa perkara pidana militer (pidana kejahatan) merupakan prioritas penyelesaian perkara di tahun berikutnya. Karena itulah seluruh sisa perkara selalu dapat diselesaikan di awal tahun berikutnya sehingga kinerja penyelesaian sisa perkara pidana kejahatan setiap tahunselalu mencapai 100%.

## **2) Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan**

Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu lintas Militer Yang Diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang harus diselesaikan.

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer di tahun 2023.

Perkara pelanggaran lalu lintas militer dalam indikator kinerja ini adalah perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh personel militer.

Tidak terdapat sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer di tahun 2023. Hal ini dikarenakan proses penyelesaian perkara pelanggaran yang singkat dan tidak

terdapat perkara pelanggaran lalu lintas yang masuk/diregister menjelang akhir tahun 2023.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan			
	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023		100%	100%	100%
2022		100%	100%	100%
2021		100%	100%	100%

Adapun perbandingan penyelesaian sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer di tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021 adalah sebagaimana ditunjukkan tabel diatas.

Dari tabel terlihat bahwa kinerja penyelesaian sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer di tahun 2023 dibanding di tahun 2022 dan tahun 2021 adalah tetap yaitu 100%.

Dengan terpenuhinya target kinerja penyelesaian sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer, maka perjanjian kinerja tahun 2023 telah terpenuhi.

Langkah-langkah dan kebijakan dalam penyelesaian sisa perkara pelanggaran lalu lintas yang membuahkan hasil memuaskan dan sesuai target, akan diterapkan di tahun 2023 sehingga diharapkan sisa perkara tahun 2023 akan diselesaikan seluruhnya di tahun 2023.

Grafik Perbandingan Persentase Capaian Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan



### **3) Persentase Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana militer yang diselesaikan.

Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Semakin banyak perkara yang diputus maksimal dalam waktu 5 bulan maka semakin baik kinerja penanganan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Dari 67 perkara yang menjadi beban di tahun 2023, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dapat memutus sejumlah 67 perkara yang terdiri dari 66 perkara kejahatan dan 1 perkara pelanggaran.

Tabel: Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Pidana  
Militer Berdasarkan Bulan Putus

NO	BULAN	< 3 BULAN	4 - 5 BULAN	6 - 12 BULAN	> 12 BULAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	JANUARI	0	0	0	0	
2	FEBRUARI	0	0	0	0	
3	MARET	12	0	0	0	
4	APRIL	2	0	0	0	
5	MEI	5	0	0	0	
6	JUNI	7	0	0	0	
7	JULI	1	0	0	0	
8	AGUSTUS	3	0	0	0	
9	SEPTEMBER	4	0	0	0	
10	OKTOBER	7	0	0	0	
11	NOVEMBER	11	0	0	0	
12	DESEMBER	15	0	0	0	
<b>JUMLAH</b>		<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Dari tabel di atas terbaca bahwa sebanyak 67 perkara yang menjadi tugas Pengadilan militer II-11 Yogyakarta dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga prosentase perkara yang diputus secara tepat waktu di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebesar 100,00%

Dari data penyelesaian perkara di atas, selanjutnya dapat dihitung besar realisasi dan capaian penyelesaian perkara pidana militer secara tepat waktu di tahun 2023.

Besaran realisasi dan capaian tersebut sebagaimana tabel di bawah.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu

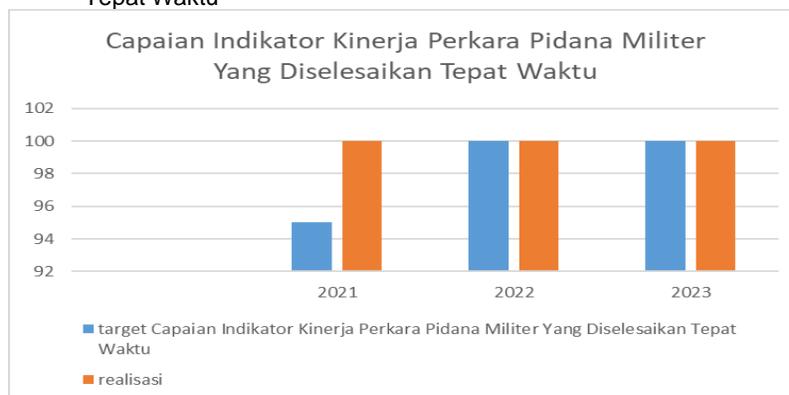
Indikator Kinerja	Persentase Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu			
	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023		100%	100 %	100,00%
2022		100%	100 %	100,00%
2021		95%	100 %	100,00%

Dari hasil monitoring dan evaluasi diperoleh data bahwa adanya tidak ada kenaikan atau penurunan capaian tahun 2023 dibanding tahun 2022 yaitu 100%.

Adapun peningkatan kinerja tahun 2023 dibanding tahun 2021 dikarenakan adanya perbaikan manajemen peradilan, diantaranya yaitu :

- Adanya koordinasi dengan pihak Oditurat Militer maupun Penasehat Hukum dalam menghadirkan Terdakwa dan para Saksi. Dengan semakin baiknya koordinasi tersebut maka para Terdakwa dan Saksi dapat hadir tepat waktu selama menjalani persidangan yang pada akhirnya dapat mempercepat waktu penyelesaian persidangan.
- Pelaksanaan sidang tepat waktu sesuai dalam jadwal sidang.
- Efektifitas pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer.
- Terdakwa dan Saksi yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan.

Grafik : Capaian Indikator Kinerja Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu



#### 4) Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah perkara pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan.

Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Tabel : Rekapitulasi Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Pelanggaran Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Jenis Perkara	Sisa awal Perkara (2023)	Perkara Masuk 2023	Perkara Putus	Lama Proses Penyelesaian Perkara (Dalam Bulan)	
				≤ 5	≥ 5
Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Militer	0	1	1	1	0

Tabel : Capaian Indikator Kinerja Perkara pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Persentase Perkara Pelanggaran lalu Lintas Militer Diselesaikan Tepat waktu			
	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023		100%	100%	100%
2022		100%	100%	100%
2021		100%	100%	100%

Perbandingan penyelesaian sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer di tahun 2023 dengan tahun 2022 dan 2021 sebagaimana terlihat pada tabel diatas.

Dari tabel terlihat bahwa kinerja penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas militer di tahun 2023

dibanding di tahun 2022 dan tahun 2021 adalah tetap yaitu sebesar 100%.

Grafik : Perbandingan Persentase Capaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu



Hasil monitoring mencatat bahwa perkara pelanggaran lalu lintas yang dapat diselesaikan secara tepat waktu yaitu :

- Perkara pelanggaran lalu lintas dapat segera disidangkan dan diputus tanpa kehadiran Terdakwa.
- Jumlah perkara pelanggaran tidak terlalu banyak, sehingga tidak menjadi beban yang menonjol bagi penyelesaian perkara di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

#### **5) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali**

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dengan jumlah perkara yang telah diputus.

Indikator ini untuk mengukur tingkat persepsi kepuasan dan pemenuhan kebutuhan para pencari keadilan terhadap putusan pengadilan.

Dari 67 perkara yang putus tahun 2023, sebanyak 34 perkara mengajukan upaya hukum banding, Kasasi

maupun Peninjauan Kembali dan sisanya sebanyak 33 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	2	3
1	Perkara kejahatan dan pelanggaran yang telah putus	67
2	Perkara yang mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)	34
Total perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum		33

Tabel : Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator Kinerja	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			
	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023		90%	49,25%	54,72%
2022		90%	71,67%	71,67%
2021		71%	81.54%	114,85%

Capaian penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021 adalah sebagaimana ditunjukkan tabel diatas.

Dari tabel terlihat bahwa capaian penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding di tahun 2023 mengalami penurunan dibanding di tahun 2022 dan tahun 2021.

Dari hasil monitoring dan evaluasi diketahui bahwa capaian tahun 2023 mangalami penurunan dibanding tahun 2022 karena adanya penambahan target kinerja di tahun 2023. Di samping itu perkara yang mengajukan mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) adalah Terdakwa, hal itu di karenakan terdapat Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

## **6) Index Persepsi Pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan**

Pelayanan publik yang prima merupakan tugas semua instansi pemerintah tidak terkecuali Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Meski demikian, sering kali layanan publik dikeluhkan warga karena tidak memenuhi ekspektasi dan kepuasan pengguna layanan. Pertanyaannya adalah apakah setiap ekspektasi maupun ketidakpuasan pengguna layanan adalah selalu benar? Jawabannya tentu tidak selalu benar.

Karena itu diperlukan standar ukuran baik buruknya kualitas pelayanan instansi pemerintah. Sebagai badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat pengguna layanan pengadilan yang tidak hanya sebatas kepada para pihak yang berperkara akan tetapi semua lapisan masyarakat.

Hal tersebut terbukti dengan survey kepuasan masyarakat yang terus meningkat. Dalam hal persepsi pengguna layanan yang puas terhadap layanan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tercermin banyaknya masyarakat pengguna layanan dalam hal ini para mahasiswa yang melaksanakan magang ataupun melaksanakan penelitian di pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang sangat banyak.

## **B) SASARAN STRATEGIS 2**

### ***Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara***

#### **Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Yang Dikirim Ke para pihak tepat Waktu**

Persentase salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu adalah perbandingan

antara jumlah salinan putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan. Indikator ini untuk mengukur kinerja dalam memenuhi hak para pihak.

Berdasar Surat Edaran mahkamah Agung nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan serta berdasar undang-undang nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memberikan salinan putusan kepada para pihak yang berhak mendapatkan yaitu Papera, Ankum, Oditur Militer dan Penyidik.

Pada tahun 2023 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mengirimkan 67 salinan putusan kepada Oditur Militer dan sejumlah 67 salinan putusan kepada Papera, Ankum dan Penyidik.

Tujuan dari pengiriman salinan Putusan ini yaitu :

- Melaksanakan amanat undang-undang dan peraturan lain terkait pengiriman salinan putusan.
- Agar Ankum atau kesatuan Terdakwa mengetahui tentang Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, beserta pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar penjatuhan putusan.
- Agar Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memiliki dokumen Putusan apabila mempertimbangkan untuk mengajukan upaya hukum.

Tabel : Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada para pihak Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Persentase salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu			
	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023		100%	100%	100%
2022		100%	100%	100%
2021		100%	100%	100%

Grafik : Perbandingan Persentase Capaian Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada para pihak Tepat Waktu



Dengan mengirimkan seluruh salinan Putusan kepada para pihak, maka Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah merealisasikan 100% dari target yang ditentukan, sehingga diperoleh capaian sebesar 100%. Capaian ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Dengan terpenuhinya target, maka Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melaksanakan perjanjian kinerja dengan baik.

Salinan putusan yang dikirim kepada Para pihak secara tepat waktu tahun 2023 menghasilkan capaian yang sama seperti tahun 2022 dan tahun 2021.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa capaian ini didukung oleh faktor yaitu :

- Pelaksanaan kerja yang sesuai SOP.
- Komitmen seluruh pegawai untuk memberikan pelayanan yang terbaik.
- Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam hal pengiriman salinan putusan memanfaatkan teknologi informasi.

### **C) SASARAN STRATEGIS 3 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan**

Sasaran Strategis Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan ditetapkan untuk

mengukur kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu atau berada di pelosok daerah.

Sasaran strategis ini memiliki indikator kinerja yaitu Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menilai efektifitas penyelesaian perkara melalui sidang keliling.

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	90%	200%	100%

Penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan dilaksanakan melalui kegiatan sidang keliling. Pelaksanaan sidang keliling merupakan salah satu kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Sidang keliling dilaksanakan guna menyelesaikan perkara dengan pertimbangan :

- Lokasi kesatuan Terdakwa atau tempat tinggal para Saksi dinilai terlalu jauh sehingga menyulitkan Terdakwa dan para Saksi untuk menghadiri persidangan.
- Jumlah Saksi yang relatif cukup banyak dan domisilinya relatif jauh jaraknya dari tempat persidangan di pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- Perkara yang sebagian besar Terdakwa atau para Saksinya berada di lokasi yang sama dan atau berdekatan.

Tabel : Pelaksanaan Sidang Keliling

No	Tanggal Sidang	Tempat Sidang	Jml Perkara yang disidangkan	Jml Perkara yang diputus	Biaya	DIPA
1	2	3	4	5	6	7
1	13 s.d. 16 Maret 2023	Pengadilan Agama Mungkid	8	8	Rp22.460.000	Rp22.460.000
2	09 s.d. 13 Oktober 2023	Pengadilan Agama Purwokerto	4	4	Rp22.540.000	Rp22.540.000

Tahun 2023 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melaksanakan 2 kali sidang keliling. Tabel diatas menunjukkan bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta merencanakan sidang keliling untuk penyelesaian 12 perkara pidana militer. Dari hasil sidang keliling ini 12 perkara pidana militer dapat diputus.

Perkara yang belum dapat diputus pada saat sidang keliling disebabkan karena beberapa kondisi yaitu :

- Saksi yang masih belum dapat hadir walaupun sudah dipanggil secara sah sesuai undang-undang.
- Terdakwa tidak hadir saat tuntutan.
- Penasihat Hukum mengajukan pledoi.

Manfaat dari penyelesaian perkara melalui sidang keliling yaitu :

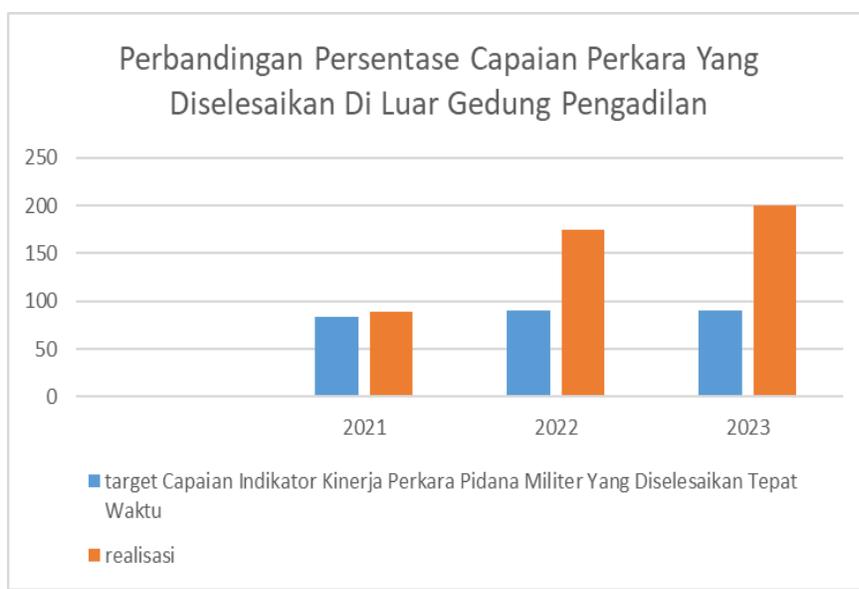
- Terdakwa atau Saksi yang Kesatuan atau tempat tinggalnya jauh dari gedung Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dapat memperoleh akses untuk mendapatkan keadilan.
- Saksi atau pengunjung yang memiliki kendala fisik seperti sakit atau usia renta yang menjadi penghalang untuk hadir ke gedung Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, dapat

memperoleh kesempatan untuk hadir dalam sidang keliling.

Tabel : Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Diselesaikan DiLuar Gedung Pengadilan

Indikator Kinerja	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan			
	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023		90%	200%	100 %
2022		90%	175%	175 %
2021		83%	89,57%	100%

Grafik : Perbandingan Persentase Capaian Perkara YangDiselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan



Dari indikator kinerja perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan tahun 2023 diperoleh capaian sebesar 100%. Capaian ini dikategorikan sangat baik karena telah melampaui target.

Capaian pada indikator ini tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 dan tahun 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- Adanya peningkatan jumlah perkara yang dapat di putus pada saat kegiatan sidang keliling di tahun 2023 dibanding tahun 2022.
- Adanya penambahan anggaran untuk sidang keliling dari satker pusat.
- Target kinerja tahun 2023 lebih tinggi dibanding tahun 2022.

Adapun peningkatan capaian tahun 2023 dibanding tahun 2022 disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

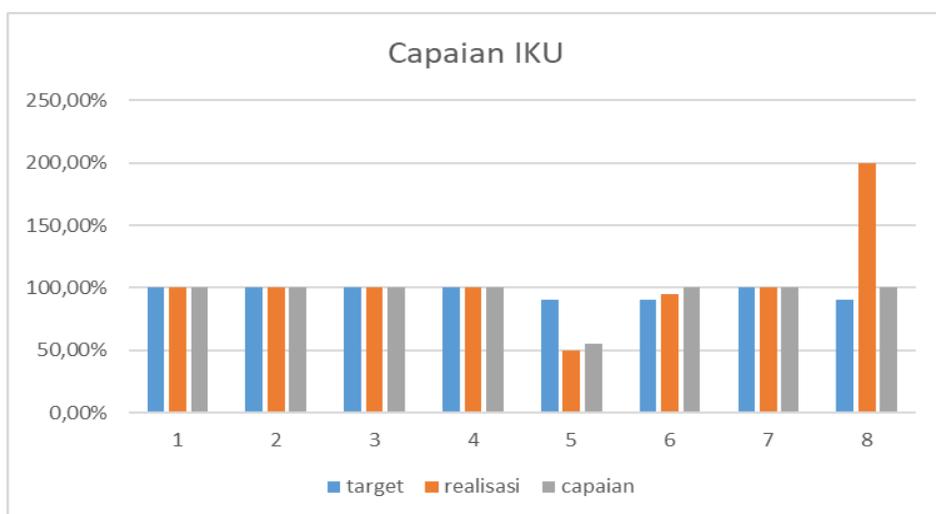
- Adanya koordinasi dengan Oditur agar dapat menghadirkan seluruh Terdakwa dan Saksi.
- Berpedoman dengan program kerja yang telah di susun dan sesuai dengan SOP.

Dengan terpenuhinya target kinerja sidang keliling, maka perjanjian kinerja tahun 2023 telah terpenuhi.

Faktor pendukung dan program aksi atas terlaksananya sidang keliling tahun 2023 dengan hasil yang memuaskan dan sesuai target, telah dicatat dalam laporan monitoring dan evaluasi. Catatan ini akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan sidang keliling tahun 2023. Diharapkan capaian sidang keliling tahun 2023 akan lebih meningkat.

Dari capaian di 3 sasaran strategis sebagaimana diuraikan di atas, dapat dinyatakan bahwa capaian kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dikategorikan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya sebagian besar target kinerja sesuai indikator kinerja pada indikator kinerja utama (IKU).

Grafik : Capaian IKU



## B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, pada awal tahun 2023 Pengadilan Militer II-

11 Yogyakarta mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp4.258.976.000 (empat miliar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut:

**1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi.**

DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dengan Nomor SP DIPA-005.01.2.663292/2023 tanggal 30 November 2022 terdiri dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, meliputi belanja pegawai dan belanja barang serta Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung yang meliputi belanja modal.

Anggaran DIPA (01) awal Tahun 2023 sebesar Rp4.175.976.000,00 (Empat milyar seratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

a) Belanja Pegawai :

- Pagu	Rp 2.737.245.000,-
- Realisasi	Rp 2.577.657.191,-
- Sisa	Rp. 159.587.809,-
<b>Prosentase</b>	<b>94,16 %</b>

b) Belanja Barang Operasional

- Pagu	Rp 1.230.841.000,-
- Realisasi	Rp 1.228.931.729,-
- Sisa	Rp 1.910.271,-
<b>Prosentase</b>	<b>99,84 %</b>

c) Belanja Modal

- Pagu	Rp 207.890.000,-
- Realisasi	Rp 207.000.000,-
- Sisa	Rp 890.000,-
<b>Prosentase</b>	<b>99,57 %</b>

**2. DIPA (05) Ditjen Badilmiltun.**

DIPA (05) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Nomor SP DIPA-005.05.2.663293/2023 tanggal 30 November 2022, dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer berupa belanja barang. Anggaran DIPA (05) sebesar Rp 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah).

Realisasi Anggaran Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2023 pada DIPA (05) berdasarkan rincian belanja dan berdasarkan program kerja, dijelaskan pada tabel-tabel berikut ini:

a) Belanja Barang Operasional

- Pagu	Rp 83.465.000,-
- Realisasi	Rp 78.091.800,-
- Sisa	Rp 5.373.200,-
<b>Prosentase</b>	<b>94,00 %</b>

b) Belanja Barang Non Operasional

- Pagu	Rp. -
- Realisasi	Rp. -
- Sisa	Rp. -

**a. Belanja Barang**

Pagu belanja barang dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebesar Rp 1.230.841.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah), ini terdapat penurunan anggaran sebesar Rp 102.590.000,00 (seratus dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari pagu belanja barang tahun sebelumnya pada tahun 2022 sebesar Rp 1.333.431.000 (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat rupiah)

**c. Belanja Modal**

Pagu belanja modal dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebesar Rp 207.890.000,00 (dua ratus tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah), ini terdapat penurunan sebesar Rp 207.710.000,00 (dua ratus tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dari pagu belanja barang tahun sebelumnya pada tahun 2022 sebesar Rp 415.600.000,00 (empat ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah) (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

**2. Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja/Kegiatan**

Untuk mewujudkan indikator kinerja Tahun 2023 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta diperlukan kegiatan/indikator kegiatan yang telah dicantumkan dalam

program atau Rincian Kerja Anggaran Kelembagaan/Lembaga (RKAKL) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2023 serta telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahunan 2023, sebagai berikut:

Tabel Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja dan Indikator Kegiatan

Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target		Realisasi			
				Volume	Anggaran (Ribuan Rp)	Volume	%	Anggaran (Ribuan Rp)	%
		Peningkatan Manajemen Peradilan Militer		80 Perkara	83.465.000	67 Perkara	80%	78.091.800	94,00%
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara pidana tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu		Jumlah sisa perkara tingkat diselesaikan tepat waktu	0 Perkara	0	0 Perkara	100%	0	100,00%
	Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan		Jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu	5 Perkara	2.123.880	1 Perkara	1%	424.776	20,00%
	Persentase perkara pidana tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu		Jumlah perkara pidana tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu	80 Perkara	28.460.000	67 Perkara	100,00%	28.460.800	100,00%

Tabel Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja dan Indikator Kegiatan

Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target		Realisasi			
				Volume	Anggaran (Ribuan Rp)	Volume	%	Anggaran (Ribuan Rp)	%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		Jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding	60 Perkara	1.260.000	46 Perkara	68,65%	2.382.900	100%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi		Jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum kasasi	60 Perkara	1.260.000	54 Perkara	80,59%	2.382.900	100%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK		Jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum PK	2 Perkara	1.260.000	N/A	N/A	N/A	N/A
Layanan				Layanan					

Tabel Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja dan Indikator Kegiatan

Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target		Realisasi			
				Volume	Anggaran (Ribuan Rp)	Volume	%	Anggaran (Ribuan Rp)	%
		Penyampaian berkas perkara Banding, Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu		2 Perkara	1.260.000	0 Perkara	0,00%		0,00%
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas perkara (salinan putusan) yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu		Jumlah berkas perkara (salinan putusan) yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu	80 Perkara	4.040.000	67 Perkara	100,00%	3.766.500	93,23%
	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu		Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	6 Perkara	5.040.000	34 Perkara	100,00%	4.765.800	96,58%
Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.	Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)		Jumlah perkara yang diselesaikan dan telah diupload ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	80 Perkara	N/A	67 Perkara	100,00%	N/A	N/A

Tabel Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja dan Indikator Kegiatan

Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target		Realisasi			
				Volume	Anggaran (Ribuan Rp)	Volume	%	Anggaran (Ribuan Rp)	%
		Perkara Peradilan Militer yang diselesaikan melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan Hakim Terbang		4 Perkara	45.000.000	12 Perkara	200,00%	45.000.000	100%
Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Prosentase pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)		Jumlah Pelaksanaan sidang keliling	2 Sidang	45.000.000	2 Sidang	100,00%	45.000.000	100%
	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)		Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)	4 Perkara	45.000.000	12 Perkara	200,00%	45.000.000	100,00%

Tabel Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja dan Indikator Kegiatan

Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target		Realisasi			
				Volume	Anggaran (Ribuan Rp)	Volume	%	Anggaran (Ribuan Rp)	%
		Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan		12 Layanan	4.175.976.000	12 Layanan	100,00%	4.013.588.920	96,11%
		Layanan Dukungan Manajemen Satker		12 Layanan	3.968.086.000	12 Layanan	100,00%	3.086.588.920	95,93%
	Persentase temuan yang ditindaklanjuti		Tindak lanjut hasil temuan	1 Layanan	2.000.000	1 Layanan	100,00%	1.300.000	65,00%

Tabel Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja dan Indikator Kegiatan

Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target		Realisasi			
				Volume	Anggaran (Ribuan Rp)	Volume	%	Anggaran (Ribuan Rp)	%
		Layanan Perkantoran	Layanan Dukungan Manajemen	12 Layanan	3.968.086.000	12 Layanan	100,00%	3.086.588.920	95,93%
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ( <i>access to justice</i> )	Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan		Penyelenggaraan publikasi putusan di Direktori Putusan MA	80 Perkara	168.000.000	67 Perkara	83,75%	168.000.000	100,00%
	Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti		Penanganan pengaduan dan informasi	1 Layanan	2.000.000	1 Layanan	100,00%	1.300.000	65,00%
Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja	Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran		Penyelenggaraan operasional perkantoran	12 Layanan	1.230.841.000	12 Layanan	100,00%	1.228.931.729	97,00%
	Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan		Pembayaran gaji dan tunjangan	12 Layanan	2.737.245.000	12 Layanan	100,00%	2.577.657.191	94,00%

Tabel Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja dan Indikator Kegiatan

Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target		Realisasi			
				Volume	Anggaran (Ribuan Rp)	Volume	%	Anggaran (Ribuan Rp)	%
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung		2	197.890.000	2	100,00%	197.500.000	99,80%
			Layanan	Layanan					
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP	2	10.000.000	2	100,00%	9.500.000	95,00%
				Unit		Unit			

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan.**

Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, tentunya terdapat juga pembelajaran yang berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi bagian yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus tercipta perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, beberapa kesimpulan dan saran dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat lebih baik dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tahun 2023 pada prinsipnya lebih baik dibandingkan tahun 2022, hal itu terlihat dari segi realisasi anggaran yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan di bandingkan tahun 2022. Capaian kinerja tahun 2022 sebesar **90,89%**, sedangkan capaian kinerja tahun 2023 sebesar **97,85%**. Setelah di laksanakan monitoring dan evaluasi peningkatan realisasi penyerapan anggaran di karenakan bahwa dalam melaksanakan penyerapan anggaran telah sesuai dengan yang direncanakan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
2. Bahwa LKjIP Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2023 ini secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, terdapat berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Akuntabilitas Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, bila diukur dengan standar personel, materiil, perangkat lunak pengendali yang tersedia, maka diperoleh kesimpulan bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah memenuhi standar kemantapan organisasi.
4. Pertanggungjawaban terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tahun 2023 adalah 67 perkara.

5. Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana DIPA tahun 2023 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

**B. Saran.**

1. Untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sangat diperlukan peningkatan keterampilan dan kemampuan baik bagi Hakim, Pejabat Kepaniteraan, Panitera Pengganti dan Pejabat Kesekretariatan serta seluruh staf lainnya untuk mengikuti diklatpim serta pelatihan-pelatihan, bimtek maupun diklat.

2. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Mahkamah Agung sesuai dengan *core bussines* (ciri khas) dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara pada seluruh tingkat peradilan di empat lingkungan peradilan.

3. Perlu diselenggarakan pelatihan dan atau sosialisasi penyusunan SAKIP agar pegawai yang menangani laporan lebih memahami mengenai proses dan cara penyusunan SAKIP serta terwujudnya SAKIP yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi dalam pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan, karena akurasi keterbukaan dan kejujuran di dalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) harus dapat dipertanggungjawabkan.

5. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), merupakan instrumen objektif yang tidak berpihak.

6. Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai instrumen *punish and reward* merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrumen lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.

7. Keterbukaan dan akuntabilitas di dalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ini disusun semoga dapat menjadikan gambaran tentang kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan sebagai pertanggungjawaban sesuai ketentuan dan ketetapan yang berlaku.

Yogyakarta, Januari 2024

Kepala Pengadilan Militer II-11,



Rony Suryandoko  
Kolonel Cnk